

ANALISIS REALISASI RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

**Ni Wayan Ratna Sari, Ketut Sariana,
Kadek Mega Utami, Ida Ayu Rysma Dewi**

Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, perealisasi anggaran dinas pendidikan pemerintah provinsi bali dan bagaimana dampak dari realisasi anggaran terhadap sistem pemerintahan di Provinsi Bali. Dari hasil penelitian ini maka Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, jika dilihat dari segi pendapatan daerah tersebut terealisasi dengan sama rata pada setiap triwulannya, dan dari segi belanja maka belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan jumlah sebesar Rp.1.299.897.308.340,00 per satu tahun. Pada belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai anggarannya sebesar Rp.864.021.906.964,00 dan pada belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp.435.875.401.376,00.

Kata kunci: Realisasi, Ringkasan, Dokumen, Anggaran

Abstract

This study aims to determine the analysis of the Realization of the Document Summary of the Implementation of the Regional Budget Work Unit at the Bali Provincial Education Office, the realization of the Bali provincial government education department budget and how the impact of the budget realization on the government system in the Province of Bali. From the results of this study, the Realization of the Document Summary of the Implementation of the Regional Work Unit Budget Unit in the Bali Provincial Education Office, when viewed in terms of regional income is realized equally evenly on a quarterly basis, and in terms of expenditure the expenditure consists of indirect expenditure and direct expenditure with the amount of Rp.1,299,897,308,340.00 per one year. On indirect expenditure which includes personnel expenditure, the budget is Rp.864,021,906,964.00 and on direct expenditure which covers employee expenditure, goods and services expenditure and capital expenditure Rp.435,875,401,376.00.

Keywords : Realization, Summary, Documents, Budget

1. Pendahuluan

Di Indonesia akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan di dalam menunjang kinerja suatu negara atau daerah. Karena dengan adanya akuntansi pemerintahan suatu negara atau daerah dapat mengolah sistem pemerintahan menggunakan sistem akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi di lembaga pemerintahan akan memudahkan pihak-pihak

pemerintahan di dalam mengolah data-data keuangan maupun data-data penting lainnya. Sudah terbukti dengan adanya akuntansi pemerintah akan mampu meningkatkan kinerja suatu wilayah, salah satu contohnya adalah Bali. Bali merupakan salah satu wilayah yang kinerjanya dalam menjalankan sistem pemerintahannya sudah menunjukkan sebuah nilai positif bagi perekonomian baik untuk negara maupun untuk wilayah di daerah Bali itu sendiri. Dengan kinerja yang sudah efektif dan mampu memberikan peningkatan terhadap perekonomian negara maka, pada tahun 2018 pemerintah provinsi Bali secara insentif menerima dana sebesar Rp. 41,5M untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya anggaran tersebut akan mampu membantu pemerintah di dalam mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Gunawan Adisaputro : 2006) Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan pemerintah daerah dalam periode satu tahun anggaran di dalam melaksanakan kewenangan pemerintah. Di dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan tidak dapat lepas dari tiga siklus utama pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang dan untuk menentukan berbagai tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut. (Westra) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang digunakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Pengawasan adalah proses untuk menetapkan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang akan diharapkan yang sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan tersebut. APBD yang akan disusun memiliki tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat mencapai suatu sasaran yang sudah ditetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah. Fungsi APBD pada dasarnya sama dengan fungsi APBN yang membedakannya hanya pada lingkup wilayahnya, dimana APBD hanya mencakup wilayah daerah tingkat I dan tingkat II, selain itu adapun fungsi lain dari APBD yaitu untuk menggerakkan roda pemerintahan daerah, menjaga eksistensi pemerintahan daerah dan membangun kegiatan perekonomian di suatu daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan sebuah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran, perubahan dalam APBN, dan akuntabilitas anggaran negara setiap tahun ditetapkan oleh Undang-Undang yang mengatur tentang APBN. Anggaran suatu instrumen untuk mengatur pengeluaran dan juga pendapatan Negara untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum. Anggaran memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan dan pengeluaran adalah hak bahwa tugas negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Tujuan APBN adalah untuk memandu suatu anggaran pendapatan negara dan belanja negara di dalam melaksanakan suatu kegiatan negara untuk

meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat, pemerintah harus mengalokasikan semua dana yang dimiliki. (Gunawan Adisaputro : 2006) Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Agar semua agar ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pemerintah harus merealisasikan semua anggaran tersebut. (Munandar: 2012) realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan *feedback* atau timbal balik serta mengikuti agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi.

Di dalam provinsi setiap daerahnya memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Wikipedia: 2017) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten atau Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Wali kota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan atau Desa (atau satuan lainnya yang setingkat). Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat penganggaran mengenai anggaran satuan kerja perangkat daerah pada dinas pendidikan yang di catat di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah pada tahun anggaran 2018. Dokumen pelaksana anggaran (DPA) merupakan sebuah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun rumusan masalah yang dilakukan yaitu bagaimana Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, bagaimana perealisasi anggaran dinas pendidikan pemerintah provinsi bali dan bagaimana dampak dari realisasi anggaran terhadap sistem pemerintahan di Provinsi Bali.

2. Hasil dan Pembahasan

(Gunawan Adisaputro : 2006) Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan penyusunan anggaran yang baik. Beberapa keuntungan tersebut adalah :

1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan.

2. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut.
3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh.
4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan.
5. Mengingat setiap manajer atau penyedia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta.

Di samping beberapa keunggulan tersebut di atas, terdapat pula beberapa kelemahan antara lain :

1. Dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk penyesuaian. Kemungkinan ini menghendaki agar anggaran disesuaikan secara berkesinambungan dengan kondisi yang berubah-ubah agar data dan informasi yang diperoleh akurat.
3. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran.
4. Penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subyektif pembuat kebijakan terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap /cukup.

Tujuan anggaran dalam organisasi yaitu:

1. Menyatakan sasaran atau harapan
Untuk menyatukan sasaran atau harapan organisasi secara jelas dan formal. Dengan begitu maka organisasi terhindar dari kerancuan dan memberikan arah terhadap yang ingin dicapai oleh manajemen.
2. Mengkomunikasikan harapan
Untuk menyampaikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran yang dibuat dapat dimengerti, didukung dan dilaksanakan dengan baik.
3. Menyampaikan rencana kegiatan
Dengan adanya penyampaian rencana kegiatan maka ketidakpastian akan berkurang dan pengarahan kepada individu-individu dan kelompok di dalam organisasi menjadi jelas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
4. Koordinasi metode kerja.
Tujuan anggaran adalah untuk mengkoordinasikan metode atau cara yang akan digunakan dalam rangka mengoptimalkan semua sumber daya.
5. Pengendalian kinerja
Pengendalian kinerja bertujuan untuk menyediakan alat ukur dan pengendalian kinerja individu dan kelompok dalam organisasi, serta menyiapkan informasi yang menjadi dasar perlu tidaknya tindakan perbaikan.

Manfaat anggaran dalam organisasi yaitu:

1. Perencanaan kegiatan perusahaan
Sebelum kegiatan dilaksanakan lebih dahulu, perlu adanya anggaran terlebih dahulu agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan *financial*, pembelian, penjualan dan pengembangan produk.
2. Acuan kegiatan perusahaan
Dengan adanya anggaran yang sudah direncanakan maka akan mampu membantu mengarahkan manajer untuk membuat strategi terutama dalam hal budget.
3. Alat komunikasi internal perusahaan
Anggaran bisa berperan menjadi sebuah alat komunikasi internal yang menghubungkan beberapa divisi dalam organisasi dengan manajemen puncak.
4. Pengawasan kegiatan perusahaan
Setiap kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan, anggaran keuangannya tidak boleh melebihi yang sudah direncanakan. Karena jika terjadi kelebihan bisa mengakibatkan potongan anggaran bagi kegiatan yang lainnya.
5. Alat pengendalian perusahaan
Anggaran dapat berguna sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Tindakan ini akan mampu mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan perbaikan yang harus diambil.
6. Memberikan pengaruh dan motivasi
Anggaran bisa memberikan pengaruh dan motivasi kepada manajer dan karyawan untuk bekerja secara konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan perusahaan.

Karakteristik perencanaan anggaran yang baik dalam suatu perusahaan yaitu:

1. Anggaran yang penyusunannya berdasarkan program
Meskipun anggaran adalah bentuk perencanaan, namun untuk penyusunannya harus sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Jika anggaran dibuat hanya karena pembagian dana kegiatan saja, dikhawatirkan anggaran tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Karena setiap kegiatan atau program perusahaan memiliki nominal anggaran yang berbeda-beda sesuai tujuannya.
2. Anggaran yang dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban
Pusat pertanggungjawaban perusahaan dibagi menjadi empat pusat yaitu Pusat Biaya, Pusat Investasi, Pusat Laba dan Pusat Pendapatan. Penyusunan anggaran perusahaan yang tidak sesuai dengan karakter masing-masing pertanggung jawaban pusat tersebut akan menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai pada setiap karakter.
3. Anggaran yang dalam realisasinya mampu sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan
Anggaran dibentuk dengan tujuan untuk pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan yang membutuhkan keluar masuknya pendapatan perusahaan. Perencanaan anggaran dibutuhkan agar suatu perusahaan dapat berjalan seimbang antara jalannya keuangan dan jalannya kegiatan.

(M. Nafarin : 2007 : 31) Jenis- jenis anggaran yaitu :

1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan

- pada tingkat-tingkat aktivitas yang berbeda, anggaran variabel juga disebut dengan anggaran fleksibel.
- b. Anggaran Tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu, anggaran tetap juga disebut dengan anggaran statis.
2. Menurut cara penyusunannya, anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran Periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periode ini satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
 - b. Anggaran Kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat.
 3. Menurut jangka waktunya anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu paling lama satu tahun.
 - b. Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat lebih dari satu tahun anggaran.
 4. Menurut bidangnya anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran keuangan adalah anggaran yang digunakan untuk menyusun anggaran neraca yang terdiri dari :
 1. Anggaran Kas
 2. Anggaran Piutang
 3. Anggaran persediaan
 4. Anggaran Utang
 5. Anggaran Neraca
 5. Menurut kemampuan menyusun anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran Komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap.
 - b. Anggaran Partial adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap yang hanya bagian tertentu saja.
 6. Menurut fungsinya anggaran terdiri dari :
 - a. *Appropriation budget* adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.
 - b. *Performance budget* adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

(Munandar: 2012) pengertian realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan *feedback* atau timbal balik serta mengikuti agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau depisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya pada satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah suatu penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau pada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran di pemerintah pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) sedangkan di pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara adalah beralihnya konsep administrasi keuangan (financial administration) ke manajemen keuangan (financial management). Hal ini memerlukan pembaharuan pada setiap fungsi manajemen, baik pada tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan. Semua fungsi diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dasar Hukumnya adalah :

1. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
3. Permendagri 13 tahun 2006 , Permendagri 59/2007, dan Permendagri 21/2011

Tujuan Penyusunan DPA

Di bawah ini adalah beberapa tujuan dibuatnya anggaran belanja pemerintah.

1. Menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model bagaimana bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, peristiwa, dan rencana tertentu.
2. Memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah:

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

Alasan SKPD Menyusun Laporan Keuangan

1. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang atau aset yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB).
2. Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban kepala SKPD selaku PA dan Neraca selaku PB. Oleh karena kepala SKPD bukanlah pengguna uang/kas, maka kepala SKPD tidak perlu menyusun Laporan Arus Kas.
3. Dengan demikian, penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional).
4. Pertanggungjawaban atas uang/kas yang ada di SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional (pasal 14 Permendagri 13/2006) keperbendaharaan. Artinya, selain membuat pertanggungjawaban administratif kepada kepala SKPD, bendahara juga menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam UU 1/2004 tentang perbendaharaan bahwa bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh pengeluaran yang dilakukannya.

Dinas Pendidikan

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Pendidikan sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pendidikan sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
4. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Dinas Pendidikan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai fungsi yaitu:

1. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, standar pelaksanaan kewenangan Kabupaten atau Kota di bidang pendidikan.
2. Menetapkan standar pelayanan dan standard pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Luar Sekolah, Pengembangan Tenaga Kependidikan.
3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang pendidikan, sesuai dengan ketentuan dan standard yang ditetapkan.
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, untuk pengembangan kapasitas pendidikan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang terkait dengan pendidikan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
6. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan.

Analisis Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali

Dari penelitian yang kami lakukan dapat dilihat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 pada dinas pendidikan provinsi Bali rencana pelaksanaan anggaran pertriwulannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan

(Wikipedia: 2018) Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh sebuah perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/ atau jasa kepada pelanggan. Adapun pengertian pendapatan dari segi organisasi pemerintah adalah pendapatan diperoleh secara berulang kali untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu. Pendapatan pada pemerintah sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan timbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajak.

Dari analisis yang kami lakukan, maka jumlah pendapatan daerah per satu tahun sebesar Rp.112.200.000,00,yang meliputi dari pendapatan asli daerah dan hasil redistribusi daerah. Dimana anggaran tersebut direalisasikan untuk 4 triwulan, pada setiap triwulannya sudah terealisasi sebesar Rp.28.050.000,00. Jadi pendapatan daerah tersebut terealisasi dengan sama rata pada setiap triwulannya.

2. Belanja

(Wikipedia: 2018) belanja merupakan pemerolehan barang atau jasa dari penjual dengan tujuan membeli pada waktu itu. Belanja adalah pemilihan dan atau membeli. Belanja

di sektor publik terkait dengan penganggaran yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Dari analisis yang kita buat, maka belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan jumlah sebesar Rp.1.299.897.308.340,00 per satu tahun. Pada belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai anggarannya sebesar Rp.864.021.906.964,00 dan pada belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp.435.875.401.376,00.

3. Belanja Tidak Langsung

(Wikipedia: 2018) Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dari analisis yang kami buat, maka pada belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai realisasi yang dianggarkan:

1. Pada triwulan I sebesar Rp.292.791.850.544,00
2. Pada triwulan II realisasi yang aianggarkan sebesar Rp.201.959.146.685,00
3. Pada triwulan III realisasi yang dianggarkan sebesar Rp.201.140.554.683,00 dan
4. Pada triwulan IV realisasi yang dianggarkan sebesar Rp.168.130.355.052,00.

Jadi jumlah yang dianggarkan dari triwulan I sampai IV sebesar Rp.864.021.906.964,00 yang menunjukan bahwa anggaran tersebut setiap triwulannya terealisasi dengan jumlah yang berbeda-beda .

4. Belanja Langsung

(Wikipedia: 2018) Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dari analisis yang kami buat, maka pada belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal realisasi yang dianggarkan:

1. Pada triwulan I sebesar Rp.113.118.700.323,47,
2. Pada triwulan II realisasi yang dianggarkan sebesar Rp.151.123.677.135,27
3. Pada triwulan III realisasi yang dianggarkan sebesar Rp. 96.805.510.021,47
4. Pada triwulan IV realisasi anggaran sebesar Rp.74.827.513.895,79.

Jadi jumlah yang dianggarkan dari triwulan I sampai IV sebesar Rp. 435.875.401.376,00 yang menunjukan bahwa anggaran tersebut setiap triwulannya terealisasi dengan jumlah yang berbeda-beda. Jadi jumlah belanja yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi Bali kepada Dinas Pendidikan untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.299.897.308.340,00 dengan surplus atau defisit sebesar Rp.1.299.785.108.304,00.ni

Dengan semua data-data tersebut, dapat dilihat bahwa dana yang diterima dari peemrintah pusat dengan dana yang direlisasikan jumlahnya sama. Hal itu dapat menunjukkan bahwa tidak ada tindak kecurangan yang dilakukan oleh dinas pendidikan di dalam merelisasikan semua anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Perealisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali

Dari penelitian yang kami lakukan menurut pendapat dari pengguna anggaran yaitu TIA.Kusuma Wardhani, SH.,MM selaku kepala dinas pendidikan provinsi Bali anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah provinsi Bali sudah terealisasi dengan baik. Itu dapat dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Bali yang menunjukan

bahwa dana yang didapatkan dari pemerintah pusat dengan yang sudah terealisasi sudah menunjukkan kesamaan antara pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan semua kesamaan itu sudah menunjukkan bahwa semua dana yang diberikan oleh pusat sudah digunakan untuk keperluan-keperluan yang memang sudah dianggarkan sebelumnya, sehingga dana-dana tersebut terpakai untuk hal-hal yang memang sudah direncanakan bukan untuk hal-hal lain yang tidak memberikan dampak positif bagi Dinas Pendidikan.

Dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Bali. Realisasi anggaran tersebut sudah ditetapkan dan pengeluaran anggaran tersebut sudah terealisasi dengan baik dan sudah mampu memberikan dampak yang positif bagi pembangunan dari infrastruktur-infrastruktur.

Selain dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur-infrastruktur, dengan adanya perelisasian anggaran yang baik juga akan berdampak kepada sistem pemerintahan itu sendiri. Sistem pemerintahan akan otomatis ikut membaik seiring dengan perkembangan dari pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan.

Dampak Dari Realisasi Anggaran Terhadap Sistem Pemerintahan Di Provinsi Bali

Dalam perealisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali terdapat dampak yang ditimbulkan dari realisasi anggaran terhadap sistem pemerintah di provinsi Bali, yaitu dengan adanya anggaran yang sudah ditetapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi Bali di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali. Pemerintah dapat mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan per periode agar biaya yang di keluarkan tidak menyebabkan kerugian bagi dinas pendidikan itu sendiri.

Dampak positif dari perealisasi anggaran yaitu dalam bidang pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja dalam sistem pendidikan yang ada di daerah provinsi Bali, pembangunan tempat belajar mengajar serta infrastruktur lainnya menjadi meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja akan memberikan banyak hal positif bagi proses kegiatan belajar mengajar.

Dampak negatif jika perealisasi anggaran tidak dilakukan dengan baik maka yang akan terjadi yaitu kegiatan pembangunan pasti tidak akan berjalan dengan baik karena kebutuhan finansial yang mendukung kegiatan pembangunan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kinerja pada dinas pendidikan pun semakin menurun sehingga yang akan mengakibatkan proses belajar mengajar dan sistem pendidikan di Bali akan menjadi terhambat.

Namun dampak yang paling terlihat dengan adanya perealisasi anggaran adalah akan mampu memberikan berbagai dampak yang baik bagi pendidikan dan pembangunan-pembangunan dari infrastruktur yang digunakan untuk menunjang pendidikan. Di segala aspek pendidikan akan mampu berkembang lebih baik lagi karena semua dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah direlisasikan sesuai dengan porsinya masing-masing.

3. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, jika dilihat dari segi pendapatan daerah tersebut terealisasi dengan

sama rata pada setiap triwulannya, dan dari segi belanja maka belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan jumlah sebesar Rp.1.299.897.308.340,00 per satu tahun. Pada belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai anggarannya sebesar Rp.864.021.906.964,00 dan pada belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp.435.875.401.376,00.

Hasil penelitian Perealisasian Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali menurut TIA.Kusuma Wardhani, SH.,MM selaku kepala dinas pendidikan provinsi Bali anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah provinsi Bali sudah terealisasi dengan baik. Itu dapat dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa dana yang didapatkan dari pemerintah pusat dengan yang sudah terealisasi sudah menunjukkan kesamaan antara pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat

Saran

Jadi saran yang dapat kami berikan bagi pemerintah provinsi Bali terutama bagi Dinas Pendidikan adalah lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, agar semua tujuan dapat dicapai. Agar tidak ada manipulasi di dalam merealisasikan anggaran dan dalam penganggaran tersebut memang sudah benar-benar terjadi pengeluaran sebagaimana yang telah dianggarkan. Agar mampu memberikan dampak positif bagi kelangsungan pembangunan pada setiap daerah yang ada di provinsi Bali.

DaftarPustaka

- Malika. 2012. Pengertian Pengawasan. <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018
- Rudi. 2017. Pengertian Anggaran Perusahaan Secara Umum, Jenis, Manfaat dan Tujuannya. <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-anggaran.html>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2018
- Wahyono, Budi. 2017. Pengertian Belanja Dan Pengeluaran Dalam Manajemen Keuangan Daerah. <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pengertian-belanja-dan-pengeluaran.html?m=1>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2018
- Wicitra, Bandem. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Berdasarkan Analisis Anggaran Dan Value For Money Tahun Anggarran 2008-2011. http://www.academia.edu/10824643/Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Provinsi_Bali_Berdasarkan_Analisis_Anggaran_dan_Value_For_Money_Tahun_Anggaran_2008-2011. Diakses pada tanggal 20 Desember 2010
- Wikiapbn. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2. <http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-02/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2018
- Wikiapbn. 2014. Laporan Realisasi Anggaran. <http://www.wikiapbn.org/laporan-realisasi-anggaran/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2018
- Wikipedia. 2015. Pendapatan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendapatan> . Diakses pada tanggal 23 Desember 2018

